

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdullah, Rozali. 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Radjawali.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Halim,A.Ridwan. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Zairin. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Jazim, Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moonti,Roy Marthen. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: Alumni.
- Mertokusumo,Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad,Abdul Kadir. 2000. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

R Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi ke tiga*. Jakarta: Sinar grafika.

Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Oetami, A. Siti, S.H. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Redika Aditama.

Syahrani, Ridwan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana: Jakarta.

Tjandra, W. Riawan. 1999. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wantu, Fence M. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Makalah

Abdullah, Ujang. *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Buku Perpisahan Hakim Agung Mahkamah Agung RI. www.ptun.palembang.go.id, hlm 3

Riadi, Edi. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Makalah disampaikan dalam acara orientasi pemberkasan perkara peradilan agama se wilayah PTA Pekanbaru tanggal 24 Juni di Pekanbaru.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara
Jakarta;

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil ;

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/G/2019/PTUN-JKT.

